

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PROVINSI JAWA BARAT

Cindriyanti

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Djuanda
cindriyanti237@gmail.com

Susy Hambani

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Djuanda
susy.hambani@unida.ac.id

Saepul Anwar

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Djuanda
saeful.anwar@unida.ac.id

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:
13 Agustus 2024

Tanggal Revisi:
25 Oktober 2024

Tanggal Diterima:
13 November 2024

Publikasi On line:
15 Nopember 2024

Abstract

In building sustainable infrastructure and facilities, capital expenditure is an important factor that must be considered in addition to other expenditures. Regional revenues from PAD, DAU, and DAK can be used to improve public institution services and increase capital expenditure for economic growth. This study aims to analyze the influence of Regional Original Revenue, General Allocation Funds and Special Allocation Funds on Capital Expenditure of West Java Province in 2018-2022. This study uses a quantitative causality approach. The sampling method uses a saturated sampling technique. The results of this study show that Regional Original Revenue, General Allocation Fund and Special Allocation Fund simultaneously affect Capital Expenditure. Partially, Regional Original Revenue and General Allocation Fund have an effect on Capital Expenditure. Meanwhile, the Special Allocation Fund has no effect on Capital Expenditure.

Keywords Regional: Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure

Abstrak

Dalam membangun infrastruktur dan fasilitas yang berkelanjutan, belanja modal merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan selain belanja lainnya. Pendapatan daerah yang berasal dari PAD, DAU, dan DAK dapat dimanfaatkan dalam menaikkan pelayanan lembaga publik dan meningkatkan belanja modal untuk pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausalitas. Metode pengambilan sampel memakai teknik sampling jenuh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan, Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

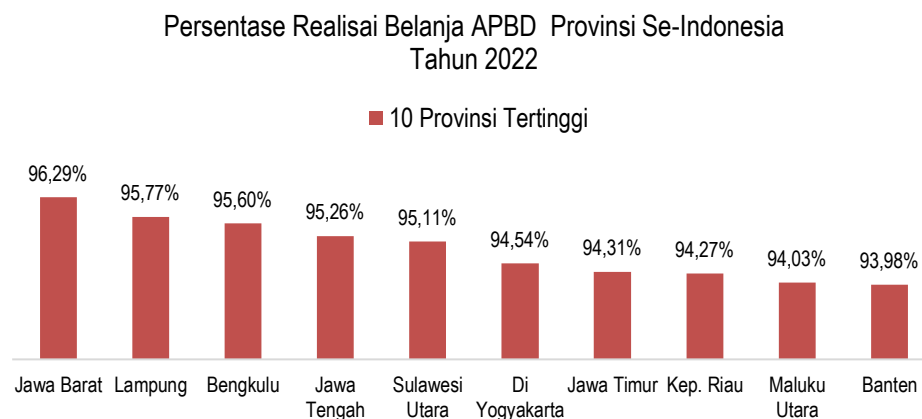
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

PENDAHULUAN

Otonomi daerah atau Desentralisasi memberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya lokal suatu daerah. Dari adanya otonomi daerah, terdapat indikator yang menjadi penilaian kemampuan suatu daerah dalam mengelola rumah tangga daerah yaitu keuangan daerah (Wahyuningsih et al., 2023). Keuangan daerah tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan daerah (Khusaini, 2018). Pengelolaan keuangan daerah sebagai wujud otonomi daerah disebut dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yaitu ketika pemerintahan pusat menyerahkan peluang bagi pemerintahan daerah akan mengelola keuangannya secara mandiri. Hal ini didukung oleh keseimbangan fiskal antar pemerintah

pusat dan daerah (Anwar et al., 2023). Karena adanya pembagian kekuasaan, penyelenggaraan negara dibiayai dari APBD sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi agenda memasukkan belanja daerah, dan pengeluaran daerah dengan jangka satu tahun anggaran (Khusaini, 2018).

Belanja modal mencakup “seluruh pengeluaran pemerintah untuk pembentukan modal, termasuk pembelian tanah, peralatan, gedung, dan infrastruktur lainnya” (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, 2005). Provinsi Jawa Barat adalah provinsi dengan persentase realisasi Belanja APBD Provinsi tertinggi di Indonesia yang disajikan pada Gambar sebagai berikut.

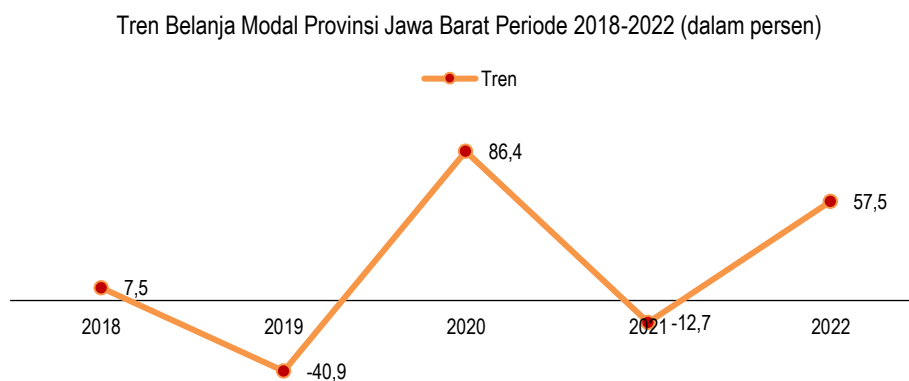


Sumber: Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI (Data diolah, 2023)

Gambar 1 Grafik Persentase Realisasi Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia (Per 22 Desember 2022)

Berdasarkan Gambar 1 persentase realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Barat memiliki nilai tertinggi sebesar 96,29%. Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah Provinsi Jawa Barat jauh berbanding dengan provinsi lainnya. “Pemerintah pusat mewajibkan modal belanja minimal 30% dari seluruh belanja daerah akan dianggarkan untuk APBD per tahun” (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, 2015). Persentase belanja modal pada tahun 2018-2022 dilihat menggunakan rasio belanja modal secara berturut-turut sebesar 18,49%, 17,20%, 15,85% 15,05% dan 14,78%, nilai tersebut berada dibawah 30% dari total belanja APBD. Sehingga, hal ini menjadi perhatian khusus terutama rendahnya belanja modal Provinsi Jawa Barat, atas dasar bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan Realisasi Belanja Daerah tertinggi pada tahun 2022.

Tren belanja modal umumnya positif dan kecenderungan meningkat (Mahmudi, 2009). Tren belanja modal Jawa Barat 2018-2022 disajikan pada Gambar sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (Data diolah, 2023)

Gambar 2 Grafik Trend Belanja Modal Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2022

Berdasarkan Gambar diatas, Trend belanja modal Jawa Barat mengalami fluktuasi mulai periode 2018-2022. Dimana pada tahun 2018, belanja modal mencapai Rp 2,86 triliun, meningkat 7,5% dari tahun sebelumnya. Ditahun 2019, belanja modal menurun menjadi Rp 1,69 triliun, turun 40,9% dari tahun sebelumnya, penurunan belanja modal disebabkan oleh penurunan pendapatan daerah akibat perlambatan ekonomi nasional dan global. Pada tahun 2020, belanja modal kembali meningkat menjadi Rp 3,15 triliun, naik 86,4% dari tahun sebelumnya, peningkatan belanja modal didorong oleh program peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Pada tahun 2021, belanja modal menurun lagi menjadi Rp 2,75 triliun, turun 12,7% dari tahun sebelumnya, penurunan belanja modal disebabkan oleh kendala dalam pelaksanaan kegiatan belanja modal akibat pandemi Covid-19, seperti pembatasan mobilitas, keterlambatan pengadaan barang dan jasa, dan protokol kesehatan. Belanja modal meningkat tajam menjadi Rp 4,33 triliun pada tahun 2022, naik 57,5% dari tahun sebelumnya, peningkatan belanja modal didorong oleh stimulus fiskal, bantuan sosial, dan vaksinasi untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan Tren Belanja Modal diatas menunjukkan bahwa Belanja Modal Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi tahun 2018-2022, dimana tahun 2019 dan 2021 sebagai tahun terendah dan tahun 2020 dan 2022 sebagai tahun tertinggi. Peningkatan belanja modal menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan infrastruktur publik yang lebih baik. Menurut (Adyatama, E., & Oktaviani, 2015) Pemerintah daerah mengucurkan dana dari PAD, DAU serta DAK akan meningkatkan layanan masyarakat, serta meningkatkan belanja modal. Belanja modal diperkirakan menjadi meningkat seiring dengan perkembangan ekonomi yang kuat dan pendapatan daerah yang meningkat.

Beberapa penelitian sebelumnya oleh (Sulistyaningsih & Haryanto, 2019) berpendapat bahwanya Pendapatan asli daerah terbukti berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan, Noviarti dan Rahayu (2021) berpendapat pendapatan asli daerah tidak mempengaruhi belanja modal. Penelitian (Heliyanto & Handayani, 2016) menunjukkan variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan, penelitian (Lestari & Basuki, 2024) variabel dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. sementara, Alpi (2022), dana alokasi khusus menunjukkan berpengaruh terhadap belanja modal. Namun, Twinki & Widiyanti (2023) menunjukkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya ditemukan perbedaan dimana menunjukkan inkonsistensi dalam literatur mengenai pengaruh terhadap belanja modal. Selain itu, berdasarkan fenomena yang dilatarbelakangi dari data trend belanja modal di Jawa Barat menunjukkan potensi fluktuasi. Adanya perbedaan dalam penelitian tersebut menarik peneliti untuk melakukan penelitian ulang menggunakan topik sejenis, tetapi dengan variabel, obyek, jumlah subjek, metode pengambilan sampel, serta alat analisis yang digunakan berbeda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Dengan mengacu pada teori agensi, yang menjelaskan peran dan tanggung jawab pemerintah pada pengelolaan anggaran serta belanja modal akan berpengaruh terhadap infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Teori keagenan (atau yang dikenal juga dengan Agency Theory) merupakan teori yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan mendefinisikan adanya hubungan kontraktual antara dua entitas, yaitu agen dan prinsipal. Prinsipal memberikan hak kepada agen untuk memutuskan sesuatu atas nama prinsipal (Jensen & Meckling, 2019). Teori ini secara spesifik menggambarkan hubungan yang timbul dari pemerintah (agen) dan masyarakat (prinsipal), dimana prinsipal merupakan pihak yang mengarahkan agen dalam melaksanakan segala pekerjaan dengan menggunakan nama prinsipal (Sutisna, D. et al., 2024).

Belanja Modal

Belanja Modal yaitu “komponen dari pendapatan daerah akan digunakan saat pembelanjaan atau pembangun aktiva tetap seperti tanah, peralatan, gedung, jalan, dan infrastruktur lainnya dengan masa manfaat lebih dari setahun”(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), 2010). Belanja ini dianggarkan pada APBD dengan kontribusi pada peningkatan layanan publik karena aset yang dibeli atau dibangun memberikan manfaat jangka panjang (Nurbaeti et al., 2023). Belanja Modal tidak hanya penting dalam peningkatan infrastruktur akan esensial tetapi dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Modal belanja memiliki peran krusial dalam pelaksanaan layanan publik karena memberikan manfaat jangka panjang(Alpi & Sirait, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah yaitu “pendapatan yang diterima oleh suatu daerah melalui sumber-sumber seperti pajak lokal, biaya pelayanan, pengelolaan aset daerah yang terpisah, dan penerimaan berbeda tersebut secara hukum selaras sesuai hukum yang berlaku” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2022).Firdausy, (2017) menjelaskan PAD merupakan dana yang dikumpulkan melalui sumber daya daerah; Semakin banyak dana yang berkontribusi pada pembiayaan daerah, semakin besar kapasitas keuangan daerah dalam memperluas daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah“komponen atas pengeluaran Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang ditujukan untuk mengatasi disparitas keuangan dan kualitas layanan publik di berbagai wilayah”(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2022). Dana ini, bersumber dari APBN, bertujuan mendukung pemerataan keuangan di tiap daerah sebagai komponen dari proses desentralisasi (Faudi, 2016).

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah“komponen atas pengeluaran daerah serta Dana Desa (TKDD) yang ditujukan untuk membiayai inisiatif tertentu yang dianggap penting secara nasional dan mendukung penyediaan layanan publik” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2022). Penggunaan dana ini telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. DAK terbagi dua menjadi jenis: DAK Fisik, yang digunakan untuk infrastruktur, dan DAK Non Fisik, yang digunakan untuk program non-infrastruktur. DAK ini tidak berbeda dengan DAU serta DBH juga termasuk dalam TKDD.

Hipotesis Penelitian

Pemerintah daerah yang diperlukan tidak mampu memanfaatkan PAD dalam membiayai pembangunan, yang tercermin dalam alokasi modal belanja (Halim, 2017). Teori agensi menjelaskan bahwa ada kontrak sosial antara masyarakat dan pemerintah, di mana pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menggunakan PAD untuk memperbaiki layanan publik dan infrastruktur. Diantisipasi bahwa kenaikan PAD dapat mengakibatkan modal belanja menjadi lebih meningkat, yang secara nyata akan meningkatkan layanan publik (Nuarisa, 2013). Berdasarkan penelitian(Marsyaf & Anasta, 2019; Sari & Hermanto, 2018;Syukri & Hinaya, 2019) menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap modal belanja. Berdasarkan analisis diajukan hipotesis berikut.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal

Teori agensi mengungkapkan dana alokasi umum bisa dimanfaatkan menjadi pembiayaan belanja modal yang mendukung penyediaan layanan publik, memainkan peran penting mengenai keterkaitan antara pemerintah bertindak sebagai prinsipal serta masyarakat menjadi agen. DAU, akan dibagikan oleh pemerintah pusat ke daerah, dengan tujuan agar mencukupi kepentingan yang beragam di setiap daerah. Dana ini, yang digunakan terutama untuk infrastruktur, berpotensi meningkatkan kualitas layanan publik(Widiasmara, 2019). DAU suatu daerah terakumulasi langsung dengan jumlah modal belanja yang dialokasikan pemerintah daerah (Hermawan et al., 2021). Berdasarkan penelitian dari (Sulistyaningsih & Haryanto, 2019;Heliyanto & Handayani, 2016; Alpi,

2022) menyatakan dana alokasi umum berpengaruh terhadap modal belanja . Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus yang diterima dari pemerintah pusat, ditujukan atas proyek-proyek spesifik akan pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang. Penggunaan DAK ini diantisipasi akan meningkatkan standar pelayanan publik melalui modal investasi (Heliyanto & Handayani, 2016). Jika jumlah DAK yang diberikan meningkat, maka pemerintah daerah cenderung meningkatkan alokasi untuk modal belanja. Sebaliknya, Jumlah yang diperuntukkan modal belanja sendiri tentu turun jika DAK menurun(Hermawan et al., 2021). Berdasarkan penelitian (Marsyaf & Anasta, 2019;Lestari & Basuki, 2024;Alpi, 2022)diperoleh bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap modal belanja. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara parsial terhadap Belanja Modal

Belanja modal, pembiayaan, prasarana dan sarana umum dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan berpotensi berdampak pada PAD. Prioritas pembangunan ditetapkan oleh DAK dalam APBD. Dana ini didanai melalui PAD dan transfer dana perimbangan oleh pemerintah pusat, yang meliputi DAU, DAK, dan DBH. Dana Perimbangan berfungsi sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan daerah dari APBN untuk meningkatkan otonomi daerah yang akan memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut karena gesekan dalam DAK, DAU, dan PAD dapat berdampak langsung pada tingkat modal belanja. Berdasarkan penelitian(Ayem & Pratama, 2018;Syukri & Hinaya, 2019;Alpi, 2022)menunjukkan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap modal belanja. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H4: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif kausalitas. Penelitian menguji hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat. Sumber pengumpulan data dari situs resmi Badan Pengawas Keuangan (BPK). Populasi yang digunakan meliputi seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat, yaitu 18 kabupaten dan 9 kota, totalnya berjumlah 27 pemerintah daerah. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode sampling jenuh. Analisis data menggunakan Eviews 12 sebagai alat analisis dan pengujian regresi data panel dilakukan dengan pemilihan model fixed effect model sebagai pendekatan terbaik. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah

$$BM_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \epsilon_{it}$$

- Keterangan:BM (Y) = Belanja Modal
- α = Konstanta
- $\beta (1,2,3,4)$ = Koefisien Regresi
- PAD (X₁) = Pendapatan Asli Daerah
- DAU (X₂) = Dana Alokasi Umum
- DAK (X₃) = Dana Alokasi Khusus
- ϵ_{it} = Error term, Kabupaten/Kota dan Rentang waktu

HASIL PENELITIAN DAN UJI HIPOTESIS

Uji Pemilihan Model Regresi

Tabel 1 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow			
Effect Test	Statistic	d.f	Prob
Cross-section Chi-square	109.241679	26	0.0000
Uji Hausman			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob
Cross-section random	40.520007	3	0.0000

Sumber: Data diolah, 2024

Penelitian dilakukan dengan menggunakan aplikasi Eviews 12 dengan Uji Chow dan Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik. Hasil yang diperoleh dengan pendekatan yang terbaik dalam penelitian yaitu fixed effect model (FEM). serupa ditunjukkan pada Tabel 1, probabilitas uji Chow dan Hausman adalah $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, model FEM ditetapkan dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai korelasi untuk setiap variabel independen mempunyai nilai dibawah 0,80. Maka, data penelitian ini berhasil melewati uji multikolinearitas. Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas yang nilai Chi-Square (Obs*R-Square 0,3980) lebih besar dari 0,05. Dengan nilai Durbin-Watson 1,70 yang mendekati 2. Maka, model residual FEM tidak menunjukkan autokorelasi. Berdasarkan hasil regresi efek tetap model, ditemukan persamaan berikut:

$$BM = -1.279370 + 0.352957PADit + 1.339999DAUit - 0.0040682DAKit + \epsilon it$$

Uji Statistik

Tabel 2 Hasil Estimasi Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.279370	2.605579	-4.910118	0.0000
PAD	0.352957	0.086368	4.086669	0.0001
DAU	1.339999	0.206054	6.503132	0.0000
DAK	-0.040682	0.084363	-0.482224	0.6307

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis persamaan berikut terlihat bahwa PAD berpengaruh terhadap modal belanja, dan nilai probabilitasnya sebesar ($0,0001 < 0,05$). Nilai koefisien statistiknya sebesar 0,35. Selain itu, koefisien DAU terhadap modal belanja sebesar 1,34 yang menunjukkan pengaruh positif pada penelitian ini, dengan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa variabel DAU mempunyai pengaruh terhadap modal belanja. Nilai koefisien t-statistik DAK sebesar 0,04 menunjukkan tidak ada pengaruh. Dilihat dari nilai probabilitasnya, nilai probabilitas DAK sebesar 0,6307 lebih besar dari ($0,05$), sehingga menyatakan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap modal belanja.

Tabel 3 Hasil Uji F dan Ajusted R-Squared (R²)

Uji	Hasil dan Pembahasan
Uji F	Nilai Prob(F-statistic) menunjukkan 0.000000, sehingga secara bersama-sama variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap belanja modal Provinsi Jawa Barat.
Ajusted R-Squared (R ²)	Nilai R ² sebesar 0.854410 atau 85,44%, mengindikasikan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan sekitar 82,39% dari variabel Belanja Modal, serta 14,56% sisanya dijelaskan oleh faktor lain selain model penelitian.

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas F menunjukkan signifikansi keseluruhan variabel. Nilai R² tercatat sebesar 0.854410 atau 85,44%, menandakan bahwa variabel independen secara bersama memberikan kontribusi penjelasan sebesar 14,56% yang terdapat pada variabel dependen.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil analisis mengindikasikan nilai signifikansi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu 0,0001 ($p < 0,05$), dimana terdapat pengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat. Artinya, PAD menjadi salah satu faktor yang dimanfaatkan untuk modal belanja. Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2018-2022 secara berturut-turut sebesar 30,43%, 33,64%, 26,69%, 34,38% dan 38,68%. Hal tersebut berarti PAD memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah untuk memberikan pelayanan publik atau infrastruktur serta Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia di wilayahnya.

Hasil penelitian konsisten dengan (Marsyaf & Anasta, 2019; Sari & Hermanto, 2018; Sari & Hermanto, 2018) dan (Syukri & Hinaya, 2019), ketiga penelitian tersebut menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap modal belanja. Hal ini menimbulkan bertambahnya penerimaan daerah yang didapat, sehingga akan menaikkan modal belanja yang dilaksanakan. Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan (Alpi, 2022; Noviarti & Rahayu, 2021; Lestari & Basuki, 2024). Ketiga penelitian tersebut menunjukkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap modal belanja. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti alokasi anggaran untuk kebutuhan lain, efisiensi pengeluaran, keterbatasan pendanaan lain prioritas pembangunan dan dampak jangka panjang modal investasi membuat ikatan PAD serta modal belanja tidak selalu signifikan.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai signifikansi 0,0000 ($p < 0,05$), yang berarti memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat. Ini berarti terdapat keterkaitan DAU dengan pembangunan infrastruktur daerah. Temuan ini mendukung teori agensi menjelaskan keterkaitan pemerintah pusat (prinsipal) serta pemerintah daerah (agen) untuk pengelolaan dana perimbangan, dengan otoritas yang diperoleh pemerintah daerah dalam menangani keuangannya secara mandiri. Kontribusi DAU terhadap total Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2018-2022 secara berturut-turut sebesar 28,83%; 27,72%; 26,14%; 24,72% dan 25,69%. Hal tersebut berarti DAU termasuk dalam pendanaan yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah yang digunakan untuk memberikan layanan publik. Dimana peningkatan nilai DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat akan mengakibatkan peningkatan modal belanja di daerah tersebut.

Hasil penelitian konsisten dengan (Sulistyaningsih & Haryanto, 2019; Heliyanto & Handayani, 2016; Alpi, 2022). Penelitian ketiga tersebut menyatakan dana alokasi umum berpengaruh terhadap modal belanja. Disebabkan peningkatan pendapatan DAU dalam APBD dapat memberikan kontribusi pada peningkatan modal belanja.

Namun, tidak sejalan dengan penelitian (Ayem & Pratama, 2018; Syukri & Hinaya, 2019; Noviarti & Rahayu, 2021) menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dalam kasus ini, sebagian DAU digunakan untuk belanja pegawai, seperti gaji, yang dapat mengurangi dana yang tersedia untuk modal belanja. DAU sebagai block grant memberikan kebebasan pada daerah dalam mengalokasikan dana sesuai dengan prioritasnya, tetapi jumlah yang diberikan akan kurang dalam memberikan pengaruh yang signifikan.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai signifikansi 0,9309 ($p > 0,05$), artinya DAK tidak berpengaruh terhadap modal belanja di Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan dalam DAK secara implisit tidak menaikkan modal belanja. Temuan ini konsisten dengan teori agensi yang menjelaskan keterkaitan dari pemerintah pusat (prinsipal) serta pemerintah daerah (agen) untuk pengelolaan dana perimbangan, di mana pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengatur keuangannya. Namun, terkadang tindakan pemerintah daerah mungkin tidak sejalan dengan harapan masyarakat, yang dapat mempengaruhi penilaian kinerja pemerintah daerah. Kontribusi DAK terhadap total Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2018-2022 secara berturut-turut sebesar 17,63%; 16,36%; 17,13%; 16,01% dan 17,24%. Selain itu, berdasarkan data DJPK Kemenkeu porsi DAK non fisik lebih besar dibandingkan DAK fisik. Hal tersebut berarti DAK tidak termasuk dalam pendanaan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah yang digunakan untuk memberikan layanan publik karena nilai yang rendah. Selain itu, dana transfer yang diberikan melalui alokasi DAK yang bersifat khusus hanya digunakan untuk proyek pembangunan yang telah diprioritaskan dan ditentukan oleh pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini berbeda dengan (Marsyaf & Anasta, 2019; Lestari & Basuki, 2024; Alpi, 2022), ketiga penelitian tersebut menyatakan bahwa DAK berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini menjelaskan bahwa tingginya jumlah dana alokasi khusus dapat menaikkan modal belanja. Namun hasil ini sesuai dengan penelitian (Syukri & Hinaya, 2019; Heliyanto & Handayani, 2016; Twinki & Widiyanti, 2023), mengindikasikan alokasi dana khusus tidak berpengaruh terhadap modal belanja. Perbedaan itu mungkin dipengaruhi oleh variasi dalam sampel serta jangka waktu yang digunakan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Secara Simultan Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus adalah 0,0000 ($p < 0,05$), dimana menunjukkan secara bersama-sama variabel-variabel ini berpengaruh terhadap modal belanja di Provinsi Jawa Barat. Ini berarti setiap perubahan, baik peningkatan maupun penurunan, pada variabel-variabel tersebut akan mempengaruhi modal belanja. Keandalan temuan ini diperkuat oleh nilai customized R-square 0.854410 atau 85,44%, dimana tampilan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus mampu menjelaskan sekitar 85,44% dari variasi dalam modal belanja, sementara sisa 14,56% penjelasan variabel di luar model penelitian. Hubungan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus mempengaruhi modal belanja. Faktor-faktor ini berkontribusi pada tingginya modal belanja. Salah satu faktor yang mempengaruhi modal belanja adalah pendapatan asli daerah. Apabila pendapatan di daerah meningkat, terutama melalui sektor pemungutan pajak, alokasi anggaran belanja modal juga akan berdampak.

Hasil Penelitian konsisten dengan (Alpi, 2022; Ayem & Pratama, 2018; Syukri & Hinaya, 2019) yang semuanya menemukan pendapatan asli daerah, dan alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh terhadap modal belanja. Hal ini mengindikasikan bahwa fluktuasi dalam variabel independen secara kolektif akan berdampak pada tingkat modal belanja.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis regresi dapat disimpulkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal Provinsi Jawa Barat, Hal tersebut berarti PAD memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah mampu memberikan pelayanan publik atau infrastruktur dan potensi pengembangan di daerah tersebut. serta penerimaan dari pemerintah pusat telah digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Sedangkan Dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap modal belanja Provinsi Jawa Barat, kemungkinan adanya kontribusi relatif kecil dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Secara simultan, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini masih terbatas diharapkan dapat menyempurnakan model penelitian seperti penambahan teori-teori tambahan dan variabel baru seperti Dana Bagi Hasil, Indeks Harga Konsumen, dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderating atau intervening. Untuk lebih memahami tren yang mempengaruhi modal belanja, disarankan juga untuk memperpanjang jangka waktu penelitian hingga lebih dari lima tahun. Selain itu, dianjurkan untuk menerapkan metodologi penelitian yang beragam dan memperluas cakupan objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyatama, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Stikubank*, 4(2), 190–205.
- Alpi, M. F. (2022). The Effect Of Economic Growth, Local Revenue, General Allocation Funds And Special Allocation Funds On Capital Expenditures In Regencies/Cities In The Province of North Sumatra. *Prosiding Seminar Internasional Kajian Islam*, 3(1), 1263–1274.
- Alpi, M. F., & Sirait, R. F. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(1), 400–404. <https://doi.org/10.29040/JAP.V2311.5557>
- Anwar, S., Lasmanal, A., Gunawan, R., Fadhill, M., Zulfikar, K. D., Nurjihan, T. K., Aryadisti, S., & Maula, A. (2023). Peningkatan Ekonomi Melalui Pengembangan UMKM Pala Pada Desa Warung Menteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, 3(5), 228–232. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v3i5.629>
- Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011–2016. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169–182. <https://doi.org/10.29230/ad.v2i2.2987>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Tren Belanja Modal Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2022*. CNBC Indonesia. Jabar.bps.go.id
- Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI. (2023). *Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi Se Indonesia Tahun 2022*.
- Faudi. (2016). *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintah Aceh*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Halim, A. (2017). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Heliyanto, F., & Handayani, N. (2016). PENGARUH PAD, DAU, DAK DAN DBH TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(3), 44–51. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1646>
- Hermawan, P. Y., Tiawon, H., & Neneng, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal of Environment and Management*, 2(3), 242–248. <https://doi.org/10.37304/JEM.V2I3.4384>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1919). *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*. 77–132. <https://doi.org/10.4159/9780674274051-006>
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Lestari, R. I., & Basuki, P. (2024). The Effect of Economic Growth, Local Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Profit Sharing Fund on Capital Expenditure of The NTB Provincial Government. *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS*, 7(1), 62–70. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i01-10>

- Mahmudi. (2009). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Marsyaf, & Anasta, L. (2019). The Effect Of Regional Income (PAD), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK) And Area Of Areas On Capital (Case Study in Regency/City on Java Island in 2016). *European Journal of Business and Management*, 11(16), 121–131. <https://doi.org/10.7176/EJBM/11-16-14>
- Noviarti, H., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2019 - 2020). *E-Proceeding of Management*, 8(5), 2355–9357. <https://openlibrarypublications.telkom.ac.id/index.php/manajemen/article/view/16494>
- Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1), 89–95. <https://doi.org/10.15294/AAJ.V2i1.1163>
- Nurbaeti, E., Hambani, S., Jamaludin Aziz, A., & Anwar, S. (2023). Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal : Kajian Pada Efektivitas Pengelolaan Piutang. *Jurnal Akunida*, 9(2), 128–136. <https://doi.org/10.30997/jakd.v9i2.10329>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (2010).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. (2015).
- Sari, I. N., & Hermanto, S. B. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(12), 1–19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/230>
- Sulistyaningsih, I., & Haryanto, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2).
- Sutisna, D., Nirwansyah, M., Ningrum, S., & Anwar, S. (2024). Studi Literatur Terkait Peranan Teori Agensi pada Konteks Berbagai Isu di Bidang Akuntansi. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4802–4821. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12973>
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA | Journal Of Economic, Management And Accounting*, 2(2), 30. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>
- Twinki, B. S., & Widiyanti, D. W. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Barat. *Journal of Development Economic and Social Studies. Universitas Brawijaya*, 2(3), 489–504. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.03>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. (2005).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. (2022).
- Wahyuningsih, A., Afif, M., & Hambani, S. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. *Mufakat: Jurnal Ekonomi , Manajemen Dan Akuntansi*, 2(5), 59–75. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i5.1089>
- Widiasmara, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset Dan Luas Wilayah, Terhadap Belanja Modal Economic Growth Sebagai Variabel Moderating Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2016. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 2(1), 45–56. <https://doi.org/10.22515/jifa.v2i1.1594>